



Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hulu

Rosmita¹ Herman²

¹Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin
 Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
 rosmita@soc.uir.ac.id

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution
 No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
 herman@soc.uir.ac.id

Received : February 29, 2020; Accepted : April 11, 2020
 DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(1).4969

Abstract

Regional autonomy is an authority granted by the central government to the lower level governments, namely the Provinces, Regencies / Cities to manage their own households. The purpose of this study was to determine the implementation of regional autonomy towards community development in Indragiri Hulu Regency. The usefulness of this research should be of theoretical, practical and academic benefit, of course. This type of research uses qualitative and quantitative research types that are descriptive based on the information the author obtained, through primary data and secondary data, with respondents totaling 200 people. The technique of analyzing the data the authors conducted a qualitative analysis that would be carried out through primary, secondary, and library sources. The analysis will use a descriptive approach. The results showed that the implementation of regional autonomy carried out by the Government of the Indragiri Hulu Regency in the category did not go well. But on the other hand, the deliberation of the development plan (Musrenbang) through the Regional Work Unit (SKPD) in the category is not running well with the policy of the City / Regency Government only prioritizing the local government and the central government. In addition, the effect of implementation on community development is not well categorized in the development of basic facilities, infrastructure.

Key Words : Regional Autonomy, Policy, Development

Abstrak

Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah tingkat bawah yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah terhadap pembangunan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu. Kegunaan dari penelitian ini hendaknya bermanfaat secara teoritis, praktis dan akademis tentunya. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bersifat uraian berdasarkan informasi yang penulis peroleh, melalui data primer dan data skunder, dengan responden berjumlah sebanyak 200 orang. Teknik analisa data penulis melakukan analisis kualitatif yang akan dilakukan melalui sumber-sumber primer, sekunder, dan dari perpustakaan. analisis akan menggunakan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dikategori tidak berjalan dengan baik. Namun pada sisi lain, musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikategori kurang berjalan dengan kebijakan Pemerintah Kota/Kabupaten hanya mementingkan pemerintah setempat dan pemerintah pusat. Selain itu, pengaruh pelaksanaan atas pengembangan masyarakat dikategorikan tidak baik pada pengembangan fasilitas dasar, infrastruktur.

Key Words : Otonomi Daerah, Kebijakan, Pembangunan.

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah tingkat bawah yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Isu pemberian otonomi daerah (pembangunan) merupakan suatu tanda bahwa ketidakpuasan terhadap berbagai urusan administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia terhadap pemerintah pusat. Bukti dari ketidakpuasan tersebut dicerminkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan regulasi ini maka banyak daerah-daerah yang menyatakan memisahkan diri menjadi Provinsi, Kabupaten/Kota baru diseluruh Indonesia dan tidak terkecuali Provinsi Riau yang diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memisahkan diri dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti yang memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis, dan banyak lagi Kabupaten/Kota yang memisahkan diri dari daerah induknya di seluruh Indonesia. Setelah regulasi ini, pada Tahun 2004 terbit kembali Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian direvisi lagi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana Undang-undang ini berbeda dari Undang-undang sebelumnya yaitu terletak pada peraturan tentang desa yang memisahkan diri menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dengan terbitnya regulasi ini diharapkan otonomi daerah dapat berjalan dengan maksimal yang mana titik pokoknya adalah pembangunan disegala bidang, baik itu infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya yang mana

tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang 1945 yang mana tujuan dari negara adalah melindungi segenap warga negara, memberikan kesejahteraan, memberikan pelayanan, rasa aman dan lain sebagainya. Dengan demikian ukuran otonomi adalah keberhasilan pembangunan di daerah dimana menurut Herman (2018) pembangunan adalah suatu rangkaian aktivitas-aktivitas pembaharuan, keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik yang dilakukan secara sadar dan terarah sehingga tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh.

Sentuhan otonomi daerah harus mampu merata di Indonesia dan tak terkecuali di Provinsi Riau khususnya lagi di Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten ini merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 425.897 jiwa. Pendapatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu ini yang tertinggi adalah dari hasil pertanian kelapa sawit, namun pada era tahun 1990-an komoditi yang tertinggi adalah dari karet. Dengan berjalannya waktu Kabupaten Indragiri Hilir dari sektor pertanian telah dikuasai oleh kelapa sawit, tetapi komoditi karet dan hasil pertanian lainnya masih ada di Kabupaten ini. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan lokasi penelitian penulis yang mana Kabupaten ini memiliki luas 8.198,26 Km² dengan memiliki 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 178 Desa. Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi);

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari hasil data yang penulis peroleh, Kabupaten Indragiri Hulu mengalami peningkatan dari sektor pembangunan diberbagai bidang, misalnya dari kesehatan pada tahun 2017 jumlah Dokter spesiali 16 orang, Dokter umum 70 orang dan Dokter gigi 19 orang. Sedangkan tenaga kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu: Tenaga Medis 109 orang, Tenaga Keperawatan 511 orang, Tenga Kebidanan 739 orang, Tengara Farmasi 23 orang dan Tenaga Kesehatan Lainnya sebanyak 92 orang. Untuk failitas kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 3 Rumah Sakit, 35 Klinik Bersalin, 20 Puskesmas, 136 Puskesmas Pembantu, dan 403 Posyandu.

Dari pembangunan sektor pendidikan juga mengalami peningkatan, Kabupaten Indargiri Hulu memiliki Sekolah Mengah Atas dan Madrasah Aliah yang tersebar di 14 Kecamatan yang terdiri dari: Gedung Sekolah sebanyak 39, Guru sebanyak 858 Orang, dan Murid sebanyak 8.575 orang. Untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah yang terdiri dari: Gedung Sekolah Sebanyak 86, Guru sebanyak 1.646 orang, dan Murid sebanyak 22.439 orang. Sedangkan untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mana Gedung Sekolah sebanyak: 312 Gedung Sekolah, 4342 Guru dan 60185 Murid.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Indaragiri Hulu yang berasal dari APBN dan APBD, adapun jumlah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 689.412.360. Dana sebesar ini meskinnya digunakan dengan sebaik mungkin untuk pembangunan di Kabupaten Indragiri

Hulu baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang memberikan dampak terhadap pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu pemerintah jangan menekankan kepada kepentingan politik semata namun untuk kepentingan masyarakat lebih diutamakan agar pembangunan dapat berjalan dengan sebaik mungkin sesuai dengan keinginan masyarakat luas.

Tinjauan Pustaka

Administrasi menurut Sondang P. Siagian (2008:5) adalah didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan korespondensi atau sama dengan catat-mencatat. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya demi mencapai suatu organisasi yang efektif dan efisien demi kelancaran dari tujuan organisasi tersebut. Dengan demikian menurut Suminta (2005:3) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apa pun bentuknya, baik itu organisasi publik maupun organisasi bisnis.

Selanjutnya menurut Herman (2019) Pelaksanaan tujuan organisasi tidak merta-merta akan berhasil tanpa ditopang oleh pelaksanaan administrasi dan

manajemen yang handal, karena ketiga hal tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena merupakan bagian dari sistem yang utuh. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa administrasi adalah penyelenggaranya (proses pembuatan kebijakan), manajemen adalah orang yang menyelenggarakan (top -middle-lower management) kerja, dan organisasi adalah wadah untuk bekerja sama (publik, bisnis dan non profit). Organisasi Menurut Wahono (2001;17) adalah kelompok manusia yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap organisasi berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu setiap organisasi membutuhkan manajemen agar sumber daya organisasi dapat digunakan secara maksimal guna mencapai tujuan dan menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang saling berkepentingan terhadap organisasi. Lebih lanjut Soejadi (2006;188) menjelaskan bahwa organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang atau lebih, yang berfungsi untuk mencapai satu sasaran dan tujuan tertentu atau serangkaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengertian organisasi menurut Simon (dalam Sufian 2003;14) mengatakan bahwa organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan lain didalam suatu kelompok manusia yang ada didalamnya. Dari definisi dan pengertian organisasi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi aspek yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah bersifat statis, dimana kegiatan-kegiatan

administrasi dan manajemen dijalankan. Unsur disini selain manusia, uang, peralatan, dan bahan termasuk mesin dan metode.

2. Organisasi sebagai proses bersifat dinamis, yaitu sebagai rangkaian kegiatan dan hirarki antara orang-orang sebagai suatu ikatan formal dan pencapaian tujuan. Ini dikarenakan peranan manusia dalam organisasi.

Berangkat dari hal diatas, administrasi dan organisasi perlu adanya pengelolaan yang disebut dengan manajemen. Menurut TheLiang Gie (dalam Zulkifli, 2005;25) mendefinisikan manajemen sebagai segenap perbuatan menggerakkan dan mengarahkan segenap sarana dalam suatu organisasi apapun untuk mencapai tujuan tertentu. Haiman (dalam Manulang 2001;3) mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Stoner (dalam Sastrohadiwiryo, 2003;2) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fayol (dalam Hasibuan 2004;16) menyebutkan bahwa fungsi manajemen antara lain :

1. Planning (perencanaan)
2. Organisation (pengorganisasian)
3. Commanding (pemberi perintah)
4. Coordination (koordinasi)
5. Controlling (pengawasan)

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bagian atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata.

Dalam rangka melaksanakan administrasi yang efektif dan efisien

menuju ke arah good governance, maka perlu adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya adalah kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan melalui regulasi yaitu Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi dari itu adalah Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pembangunan nasional.

Jika merujuk pada Dunn (2003), kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota. Kebijakan menurut Budiharjo adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh

seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2011:2) public policy is whatever governments choose to do or not to do (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Sedangkan menurut Widodo (dalam Hafis, 2015:7) kebijakan publik dibentuk untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah, hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Otonomi daerah menurut Djaenuri (2015:36) adalah hak dan kewenangan untuk mengatur/memerintah daerahnya sendiri. Sementara konsep otonomi daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan manajemen penilaian yang ada di berbagai daerah Provinsi/Kota/Kabupaten untuk merumuskan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. Menyikapi maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diatas bahwa daerah memang diberikan kebebasan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, namun daerah yang terdiri Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak bisa semata-merta bebas sesuka hatinya untuk berbuat tanpa melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah pusat karena otonomi yang kita lakukan adalah berdasarkan azas desentralisasi. Otonomi daerah yang dilakukan oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia mesti

berpedoman kepada kepentingan masyarakat, seperti apa pelaksanaannya selama ini kita dapat menilai sendiri.

Metode

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian mix method yaitu tipe penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bersifat uraian berdasarkan informasi yang penulis peroleh, melalui data primer dan data skunder dan dengan responden berjumlah sebanyak 200 orang dengan rincian yaitu 138 rsesponden masyarakat dan 62 orang responden pemerintah dan Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk teknik analisa data penulis melakukan analisis kualitatif yang akan dilakukan melalui sumber-sumber primer, sekunder, dan dari perpustakaan. analisis akan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dalam bentuk penilaian menggunakan persentase.

Hasil dan Pembahasan

Untuk membahas dampak otonomi daerah terhadap pembangunan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu, maka ada beberapa kategori penilaian yang penulis gunakan yaitu:

1. Pembangunan Fasilitas Dasar Dan Infrastruktur.
2. Penilaian Pendidikan.
3. Efisiensi Tindakan Dari Pihak Pemerintah Daerah.
4. Melarang Pegawai Negeri Sipil Berpolitik.
5. Hubungan Pegawai Negeri Sipil dengan Komunitas Setempat.
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi dan Efektivitas Program Pengembangan.
7. Budaya Politik Di Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Peranan DPRD Di Dalam Pembangunan.

Pembangunan Fasilitas Dasar Dan Infrastruktur

Salah satu pembangunan yang mesti digalakan di era otonomi daerah adalah pembangunan fasilitas dasar yang mana fasilitas dasar ini terdiri dari Jalan raya, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan fasilitas insfrastruktur terdiri dari pembangunan perumahan, Pertanian, peternakan, Perikanan, kehutanan, Perindustrian dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai mengenai pelaksanaan pembangunan fasilitas dasar dan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.
Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Fasilitas Dasar dan Infrastuktur

Pembangunan	Positif	Netral	Negatif
Fasiitas Dasar	2 (1)	45 (22,5)	16 (8)
Infrastruktur	8 (4)	20 (10)	109 (54,5)
J u m l a h	10 (5)	65 (32,5)	125 (62.5)

Sumber: Data Olahan Lapangan 2018.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sub indikator penilaian pembangunan fasilitas dasar dimana responden menanggapi positif sebanyak 2 orang atau sama dengan 1%, untuk jawaban netral sebanyak 45 orang atau sama dengan 22,5%, dan jawaban negatif sebanyak 16 orang atau sama dengan 8%. Selanjutnya tanggapan responden mengenai pembangunan infrastuktur dimana jawaban responden terkategori positif adalah sebanyak 10 orang responden atau sama dengan 5%, untuk jawaban netral yaitu sebanyak 20 orang atau sama dengan 10%, dan jawaban negatif yaitu sebanyak 109 orang atau sama dengan 54,5%. Dari jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa

pembangunan fasilitas dasar dan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan kategori negatif atau tidak efektif untuk masyarakat di Kabupaten Indragiri hulu. Salah satu alasan masyarakat menganggap negatif terhadap pembangunan fasilitas dasar yaitu buruknya fasilitas jalan, baik itu jalan berstatus jalan Kabupaten, jalan provinsi maupun jalan negara. Sebagai contoh yaitu jalan Kabupaten yang menghubungkan antara Kabupaten Indragiri Hulu (Rengat) dengan Indragiri Hilir (Tembilahan) yang tidak henti-hentinya mengalami rusak ringan hingga rusak berat. Oleh sebab itu pembangunan fasilitas dasar dan pembangunan infrastruktur merupakan prioritas bagi masyarakat karena merupakan kepentingan publik yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga keamanan, kenyamanan dan kompatibilitas publik dapat dirasakan terutama oleh masyarakat lokal di Kabupaten Indragiri Hulu.

Penilaian Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pola perilaku orang. Dengan demikian, kebijakan dan program pendidikan dikembangkan untuk menciptakan komunitas yang berpengetahuan dan terampil dalam persiapan untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional di seluruh Indonesia. Kebijakan dan program ini akan terus diimplementasikan dan akan terus beroperasi. Selanjutnya, tanggung jawab untuk pendidikan dialihkan ke Departemen Pendidikan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Di sisi lain, karena luasnya wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan populasi padat penduduk dari pembangun infrastruktur meski seimbang. Sebagaimana data yang

telah penulis ungkapkan pada latar belakang diatas bahwa Kabupaten Indragiri Hulu mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun mengenai pembangunan jumlah sekolah baik dari tingkat dasar hingga tingkat atas hingga ke tingkat perguruan tinggi. Jika pembangunan infrastuktur seimbang maka jumlah masyarakat yang bersekolah hingga tingkat lanjutan keperguruan tinggi juga mengalami perubahan signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.
Tanggapan Responden Tentang Penilaian Pendidikan

Pendidikan Responden	Frekuensi	Persentase
Tidak Sekolah	-	0
Sekolah Dasar	2	1
Sekolah Menengah Pertama	5	2,5
Sekolah Menengah Atas	109	54,5
Diploma	5	2,5
Strata 1	70	35
Strata 2	7	3,5
Strata 3	2	1
Jumlah	200	100.00

Sumber: Data Olahan Lapangan 2018.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar responden berpendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebanyak 109 atau sama dengan 54,5%, sedangkan jawaban yang paling sedikit adalah responden yang berpendidikan tamat Sekolah Dasar dan Strata 3 yaitu sebanyak masing-masing 2 orang atau sama dengan 1%, namun responden yang berpendidikan Srata 1 sama dengan 70 orang atau sama dengan 35% dimana hal ini merupakan hal yang baik jika ditinjau dari tingkat pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam hal kehidupan yang layak bagi masyarakat atau pemerintah setempat, sehingga mereka dapat memperoleh sumber penghasilan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan

keluarga karena pendidikan berjalan selaras dengan memperoleh pekerjaan.

Efisiensi Tindakan Dari Pihak Pemerintah Daerah

Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu khususnya administrator harus bertindak cepat dalam mengelola administrasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat setempat. Untuk tujuan ini, pelaksanaan administrasi kabupaten akan memberikan makna yang berarti bagi pengguna dalam pengelolaan berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam pemerintah kabupaten Indragiri Hulu. Masyarakat akan mengevaluasi administrator dengan cepat dan merasakan manfaatnya dan menganggap diri mereka beruntung jika mereka kompeten dalam pengelolaan administrasi oleh pemerintah daerah. Selain itu, administrator dalam kegiatan sehari-hari kategori sangat lambat dalam menangani hal-hal penting dalam administrasi seperti izin pengelolaan lahan, kartu tanda penduduk, izin bangunan, akta kelahiran dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan mengenai indikator ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Tindakan
Dari Pihak Pemerintah Daerah

Tindakan Pemerintah Indragiri Hulu	Positif	Netral	Negatif
Cepat	0 (0)	7 (3.5)	1 (0.5)
Kurang Cepat (Sederhana)	10 (5)	1 (0.5)	0 (0)
Lambat	21 (10.5)	0 (0)	9 (4.5)
Sangat Lambat	135 (67.5)	4 (2)	0 (0)
Gagal	8 (4)	0 (0)	4 (2)
Jumlah	174 (87)	12 (6)	14 (7)

Sumber: Data Olahan Lapangan 2018.

Kecepatan harus ditetapkan oleh atasan (pemimpin) terhadap bawahan (pegawai negeri) sampai mereka tahu metode administrasi lebih nyaman. Dari hasil penelitian, tindakan PNS di Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori sangat lambat. Ditemukan bahwa 67,5% atau 135 responden sangat lambat dalam mengelola kategori dengan kategori positif dan 5% atau 10 responden kurang responsif dalam kategori positif. Selanjutnya, dengan kategori negatif 4,5% atau 9 responden yang bertindak pejabat sipil tidak cepat (moderat) dalam melakukan kegiatan administrasi sehari-hari dan 4% atau 8 responden dalam kategori positif dengan tindakan pegawai negeri sipil gagal dalam melaksanakan administrasi. Sementara itu, 3,5% atau 7 responden dalam kategori dikeluarkan dari tindakan sipil oleh otoritas sipil dalam mengelola administrasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Di sisi lain, tindakan pegawai negeri sangat penting, untuk mencapai tujuan. Sehingga aksi tersebut akan memberikan reaksi positif kepada masyarakat serta pemerintah khususnya Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, pemerintah Indargiri Hulu memberikan respons positif kepada staf di bawahnya. Hingga mereka tahu bagaimana melakukan kegiatan administrasi yang ada.

Melarang Pegawai Negeri Sipil Berpolitik

Larangan Pegawai Negeri Sipil pada kegiatan politik diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia, seperti yang diberlakukan oleh UU No. 30 tahun 1980. Di sisi lain, relatif sedikit pegawai negeri sipil yang terlibat dalam kegiatan politik. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.
Tanggapan Responden Terhadap Larangan
Pegawai Negeri Sipil Berpolitik

Parti Politik	Frekuensi	Persentase
Terlibat	12	6
Tidak Terlibat	188	94
Jumlah	200	100.00

Sumber: Data Olahan Lapangan 2018.

Dari hasil penelitian yang dapat dikategorikan tidak terlibat, ditemukan bahwa 94 % atau 188 responden tidak terlibat dalam kegiatan politik dan 6% atau 12 responden terlibat dalam kegiatan politik. politik yang menipu masyarakat umum di daerah ini terutama untuk PNS itu sendiri. Melihat hal ini maka hendaknya ada ketegasan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dimana selaku PNS atau abdi negara memang dilarang untuk berpolitik agar selaku PNS dapat berlaku netral, disini hendaknya ada tindakan tegas sesuai dengan aturan yang ada jika kedapatan melakukan perpolitikan.

Hubungan Pegawai Negeri Sipil dengan Komunitas Setempat

Keharmonisan antara pegawai negeri dan masyarakat setempat adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena mereka saling bergantung. Keharmonisan ini harus dilaksanakan oleh berbagai pegawai negeri untuk menghargai upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sementara hubungan yang baik ada untuk menciptakan manajemen pengembangan yang baik, keduanya dapat berguna dalam hal manajemen yang efisien. Selain itu, tidak ada keharmonisan antara administrasi yang dapat gagal dalam pengelolaan berbagai aspek pembangunan. Karena kunjungan kerja oleh pegawai pemerintah penting, mereka juga memberikan masukan. Untuk lebih

jelasnya mengenai tanggapan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 5.
Tanggapan Responden Terhadap Hubungan
Pegawai Negeri Sipil dengan Komunitas Setempat

Kunjungan Pegawai	Frekuensi	Persentase
Tak Pernah	126	63
Jarang	67	33.5
Sesekali	7	3.5
Jumlah	200	100.00

Sumber: Data Olahan Lapangan 2018.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan bahwa 126 orang responden atau 63% Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan kunjungan di Kabupaten Indragiri Hulu, untuk tanggapan jarang melakukan kunjungan adalah sebanyak 67 orang atau sama dengan 33,5% yang melakukan kunjungan, dan sebanyak 7 orang atau sama dengan 3,5% yang sesekali melakukan kunjungan. Adapun alasan dari pihak pebawai berdasarkan wawancara penulis ini karena jalan menuju daerah yang tidak dapat diakses rusak berat yang terdapat didesa-desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Tetapi untuk kunjungan resmi ada biaya tinggi dan anggaran untuk itu relatif kecil yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hulu.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi dan Efektivitas Program Pengembangan

Banyak Program dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tetapi mereka adalah sebagai pelaksana saja, sementara keuangan didistribusikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Riau dengan program pembagian anggaran. Sementara itu, implementasi pembangunan infrastruktur di Departemen Kimpraswil (Penyelesaian Infrastruktur Regional) di Kabupaten Indragiri Hulu. Kimpraswil hanya dapat

melakukan pengembangan yang diarahkan oleh Kabupaten / Provinsi serta mengatur program sehingga apakah program tersebut berhasil atau tidak merupakan tanggung jawab Kabupaten / Provinsi. Namun, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pembangunan seperti legislator, keuangan, peran Pemerintah Kabupaten, sektor swasta, dan pemerintah pusat. DPRD sangat penting dalam hal pengembangan administrasi dan mereka dapat menggagalkan program pemerintah yang telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten. Karena itu, DPRD telah memberikan warna pembangunan kepada para pemilih di mana mereka memberikan suara. Namun, dalam pelaksanaannya alokasi kawasan hanya ada janji pembangunan dengan kata lain pembangunan tidak ada janji-janji saja yang tidak pernah datang dari tahun ke tahun.

Keuangan adalah landasan pengembangan administrasi, terlepas dari apakah itu sebuah program di kabupaten Indragiri Hulu. Tanpa dana yang cukup, pembangunan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, jadi itu adalah akhir pengembangan yang dipelopori oleh berbagai Departemen / Badan / Kantor di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Peran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang ingin kita bangun. Struktur yang kita buat harus dipertahankan dalam aspek administrasi pemerintahan yang efektif dan efektif dalam mengelola pembangunan. Selain itu, pembangunan adalah pola masyarakat lokal dan dapat dinikmati oleh berbagai sektor masyarakat, sehingga dampak pembangunan dapat signifikan secara politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu ada peran aktif bagi masyarakat setempat untuk mempertahankan kontrol, sehingga korupsi tidak dapat terjadi di

tingkat pemerintah sebagai ukuran pembangunan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat (Ryaas Rashid, 2002, 132-134). Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu bertindak sebagai administrator terutama untuk pemerintah swasta dan pemerintah pusat yang saling tergantung dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu. Ini berarti bahwa dengan tidak adanya sektor swasta dan pemerintah pusat sebagai dukungan finansial, pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik.

Jadi efektivitas program pembangunan daerah melibatkan DPRD, keuangan, peran pemerintah kabupaten Indragiri Hulu, sektor swasta, dan pemerintah pusat sebagai ukuran keberhasilan program yang dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah (Provinsi / Wilayah) di seluruh Indonesia. secara umum. Namun, pembangunan merupakan implementasi pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, bentuk-bentuk ini tidak mencerminkan pembangunan yang tidak merata di berbagai wilayah kabupaten saat ini. Selain itu, pembangunan untuk pemerintah daerah tidak hanya untuk pembangunan dan ekonomi masyarakat setempat.

Budaya Politik Di Kabupaten Indragiri Hulu

Partisipasi dalam kegiatan politik atau non-sukarela masyarakat melalui kegiatan atau partisipasi apa pun dalam proses pemerintahan pemilihan dan secara tidak langsung atau ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam kegiatan politik, sehingga memimpin

pemerintah untuk mencapai visi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, "Pengembangan Wilayah Indragiri Hulu Maju, Standalone, Kesejahteraan, Budaya, dan Agamis pada tahun 2020". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 6.
Tanggapan Responden Mengenai Budaya Politik Di Kabupaten Indragiri Hulu

Pengaruh Partai Politik yang Berpartisipasi	Kekerapan	Peratus
Pendidikan	9	4.5
Media Elektronik (Radio, Televisi, Internet)	167	83.5
Media Cetak (Surat Kabar, Brosur)	24	12
Jumlah	200	100.00

Sumber: Data Olahan Lapangan 2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat lokal untuk bergabung dengan partai politik di kabupaten Indragiri Hulu adalah media elektronik, dengan tanggapan sebesar 167 orang atau sama dengan 83,5% dipengaruhi oleh media elektronik (radio, televisi atau internet), sebanyak 24 orang atau sama dengan 12% melalui media cetak (koran, brosur) dan sebanyak 9 responden atau sama dengan 4,5% melalui pendidikan politik.

Secara umum pengaruh politik masyarakat lokal di Kabupaten Indragiri Hulu sebagian besar dipengaruhi oleh alat yang mereka peroleh. Meskipun banyak orang terlibat dalam kegiatan politik dan pertumbuhan partai mana pun, masyarakat lokal khususnya di Kabupaten Indragiri yang lebih rendah dari budaya politiknya masih aktif karena mereka tidak menerima keinginan para pemimpin atau pemerintah masa lalu tanpa mengungkapkan hati nurani mereka tetapi

mereka lebih menentang hak dan kewajiban mereka sendiri.

Peranan DPRD Di Dalam Pembangunan

DPRD adalah badan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Peran DPRD bukanlah memainkan peran aktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat umum. Hubungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu dengan dewan merupakan faktor yang lebih penting dalam pengembangan badan pengatur partai yang berkuasa saat itu sehingga aspirasi masyarakat diremehkan dalam arti diabaikan. Selain itu, mereka tidak lagi memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat lokal demi menjaga kedaulatan rakyat, tetapi sebaliknya mereka memusatkan kekuatan mereka pada partai mereka untuk legalitas yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 7.
Tanggapan Responden Mengenai Peranan DPRD Di Dalam Pembangunan

Peranan Anggota DPRD	Frekuensi	Persentase
Berperan	10	5
Kurang Berperan	56	28
Sama Sekali Tidak Berperan	134	67
Jumlah	200	100.00

Sumber: Data Olahan Lapangan 2018.

Berdasarkan survei yang dilakukan responden, peran DPRD benar-benar tidak berhasil, terbukti sebanyak 134 orang responden atau sama dengan 67% yang menjawab sama sekali tidak berperan, kurang berperan sebanyak 56 orang yang menanggapi atau sama dengan 28%, dan jawaban responden mengenai berperan hanya sebanyak 10 orang atau sama

dengan 5% saja. Namun, di sisi lain, pemerintah menjunjung tinggi kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ini berarti bahwa mereka belum berhasil membuat perubahan dalam pembangunan di daerah pemilihan mereka. Selain itu, mereka gagal membawa perubahan pada pembangunan yang direncanakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Di sisi lain, dalam konteks politik pembangunan sering diabaikan karena mereka lebih mementingkan kelompok yang kuat.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ditemukan bahwa Proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tidak efektif dalam mengimplementasikan fasilitas dasar, pembangunan infrastruktur, penilaian pendidikan dan pendapatan masyarakat setempat, efektivitas administrasi bawahan sebagai administrator pembangunan, akurasi tindakan oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hulu, melarang pegawai negeri sipil politik, hubungan pegawai negeri sipil dengan masyarakat setempat, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas pembangunan, dan peran Anggota DPR.

Meskipun pengembangan administrasi di Kabupaten Indragiri Hulu kurang berhasil, ini berarti bahwa proyek-proyek pemerintah kabupaten kurang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mereka sangat penting sebagai badan pelaksana program/proyek pembangunan yang diluncurkan oleh Kabupaten dan Pemerintah Pusat. Dengan demikian

keberhasilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu bukanlah keberhasilan masyarakat setempat tetapi keberhasilan pemerintah daerah dan DPRD dalam mempertahankan kekuasaan mereka.

Daftar Pustaka

- Aceng, Djaenuri, Aries. 2015. *Sisitem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan, Univeristas Terbuka Press.
- Ali, Zaini, Alhafis Raden Imam. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Dunn, M. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, H. Malayu SP., 2004. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Iqbal, M., & Herman, H. 2018. Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(1), 447-459.
- Manullang, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ryaas Rasyid, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto B, 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Soejadi, FX, 2006. *Administrasi Pada Organisasi Modern*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Sondang P. Siagian, 2008. *Administrasi Pembangunan :Konsep Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta, Bumi Aksara.

- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Sufian, Hamim, 2003. Sistem Perencanaan Strategi Dalam Pembangunan. Pekanbaru, UIR Press.
- Suminta, Praja. 2005. Administrasi Pembangunan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Press.
- Wahono, Romi Satria, 2001. Manajemen Organisasi. Jakarta, LIPI.
- Zulkifli, 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru, UIR Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah